

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara

Indri Dithisari

Politeknik Negeri Medan

indridithsari@polmed.ac.id

Lia Hartika

Politeknik Negeri Medan

liahartika@polmed.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.30596%2F11896>

ABSTRACT

The objective of the research was to analyze and find out some factors which influence IPM (Human Development Index) with Regional Expenditure as intervening variable in districts/towns of North Sumatera. The research used causal method, and the data were gathered by using documentary study and secondary data from the realization of Balance Fund, PAD (Regionally Generated Revenue), BKP (Provincial Financial Aid), Regional Expenditure, and IPM data in the period of 2011-2014. The population was 33 districts/towns in North Sumatera. The gathered data were analyzed by using multiple regression analysis and path analysis. The result of the research showed that, simultaneously, Balance Fund, PAD and BKP had significant influence on Regional expenditure. Partially, Balance Fund had positive but insignificant influence while PAD and BKP had positive and significant influence. It was also found that, simultaneously, Balance Fund, PAD, BKP, BOS (School Operational Aid) Fund, and Regional Expenditure had positive influence on IPM; partially, PAD, BKP, and Regional Expenditure had positive and significant influence on IPM. Balance Fund partially had positive but insignificant influence, while BOS Fund partially had negative and insignificant influence on IPM. Meanwhile, Regional Expenditure was an intervening variable between Balance Fund and IPM, while for PAD and BKP

Keyword: *Balancing funds, PAD (Regionally Generated Revenues), BKP (Provincial Financial Aid), BOS funds, Regional expenditure, IPM (Human Development Index).*

Cara Sitasi: Dithisari, I., Hartika, L. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, vol 22.(2), 125-136 <http://dx.doi.org/10.30596%2F11896>

PENDAHULUAN

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat diukur dengan beberapa parameter dan yang paling populer saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia untuk selanjutnya disebut IPM atau *Human Development Index* (HDI). Alat ukur ini dikembangkan oleh pemenang Nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics pada tahun 1990 dan telah disepakati dunia melalui United Nations Development Program (UNDP). IPM dapat menggambarkan perkembangan manusia secara terukur dan representatif. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses pembangunan dalam

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang (*United Nations Development Program/UNDP*, 1996). (Hidayahwati, 2011) IPM diukur dengan 3 dimensi yaitu berumur panjang dan sehat ditunjukkan oleh harapan hidup ketika lahir, yang dirumuskan menjadi Indeks Angka Harapan Hidup, berdimensi ilmu pengetahuan yang diukur dengan tingkat baca tulis dan rata-rata lama sekolah membentuk Indeks Pendidikan, dan dimensi standar hidup layak ditunjukkan oleh pengeluaran riil perkapita yang dibakukan dalam Indeks Pendapatan. (UNDP, 2004). Untuk memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia diperlukan upaya keras agar bisa mengejar ketinggalan dari negara-negara tetangga lainnya yang peringkatnya di atas Indonesia. Upaya meningkatkan IPM Indonesia tentunya tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan IPM kabupaten/kota di Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 33 kabupaten/kota.

Fenomena yang terjadi di kabupaten/kota Sumatera Utara adalah selama tahun 2011-2014 belanja daerah mengalami peningkatan namun tidak diikuti dengan peningkatan IPM. Sebagai contoh Kabupaten Langkat dengan jumlah belanja daerah terbesar ketiga dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2011-2014 namun nilai IPM berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara yaitu hanya berada di peringkat 18 dari 33 kabupaten/kota Sumatera Utara pada tahun 2011 dan 2012, berada di peringkat 15 pada tahun 2013 dan 2014. Demikian juga untuk Kabupaten Asahan yang memiliki jumlah belanja daerah terbesar kelima dari 33 kabupaten/kota Sumatera Utara namun nilai IPM hanya berada di peringkat 15 pada tahun 2011, 17 pada tahun 2012, 20 pada tahun 2013 dan peringkat 19 pada tahun 2014. Kabupaten Serdang Bedagai dengan nilai belanja daerah terbesar keenam dari 33 kabupaten/kota Sumatera Utara juga memiliki nilai IPM dengan peringkat 19 pada tahun 2011 dan 2012, peringkat 17 pada tahun 2013 serta menurun ke peringkat 18 pada tahun 2014. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa belanja daerah yang dimiliki oleh Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara belum optimal digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di beberapa kabupaten/kota Sumatera Utara jika diukur dengan besarnya belanja daerah dengan nilai IPM dari beberapa kabupaten/kota. Peningkatan IPM, salah satunya ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan memaksimalkan pengalokasian keuangan daerah untuk pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

KAJIAN TEORI

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berbagai indikator untuk melihat pencapaian pembangunan suatu wilayah telah dibuat namun tidak semua dapat dijadikan ukuran standar yang dapat diperbandingkan antar wilayah atau antar negara. Oleh karena itu UNDP menetapkan suatu standar ukuran untuk pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik itu dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia yang tercermin dari Angka Harapan Hidup (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik yang dapat dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat (Budiriyanto, 2011)

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan (Salindeho, 2016) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan selain dimaksud untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber

pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah (ferdian, 2013) Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006, dana perimbangan dibagi menjadi 3 yaitu: 1) Dana Alokasi Umum (DAU); 2) Dana Alokasi Khusus (DAK); 3) Dana Bagi Hasil (DBH).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah semakin rendah ketergantungannya terhadap bantuan pemerintah pusat. Pasal 6 UU No. 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber-sumber PAD terdiri dari :

- a. Pajak daerah yaitu pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah (Horota, Parson., Riani, I.A.P., dan Marbun, n.d.)
- b. Restribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta (Pasal 1 PP No. 66 tahun 2002).
- c. Bagian Laba Perusahaan Daerah yaitu sumber pendapatan yang berasal dari perusahaan daerah yang berorientasi kepada keuntungan. Keuntungan yang didapat perusahaan daerah sebagian diserahkan ke kas daerah. Prinsip pengelolaannya berdasarkan atas asas-asas ekonomi perusahaan.
- d. Pendapatan lain-lain yang sah yaitu penerimaan yang berasal dari usaha dinas-dinas daerah yang bersangkutan yang bukan merupakan penerimaan pajak, restribusi atau laba perusahaan daerah. Penerimaan ini bisa berasal dari sewa rumah dinas milik daerah, hasil penjualan barang-barang (bekas) milik daerah, penerimaan kios milik daerah dan penerimaan uang langganan majalah daerah (ferdian, 2013).

Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)

Untuk membantu pemerintah kabupaten/kota, provinsi memberikan bantuan dalam bentuk dana yang menjadi sumber pendapatan bagi kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut. Bantuan keuangan provinsi tersebut dimasukkan ke dalam kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah. Bantuan diberikan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan efisiensi pengeluaran kabupaten/kota. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, (kolinug, ferly Christian, kumenaung, Anderson Guntur, rotinsulu, 2015) bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan, sedangkan yang bersifat khusus pemanfaatan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah pemberi bantuan dalam hal ini adalah provinsi. Untuk yang bersifat khusus ada syarat dana pendamping dalam APBD penerima bantuan yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bagi penerima bantuan (Widari, 2016) Pemberian bantuan keuangan provinsi ini diharapkan dapat meningkatkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan untuk mensejahterakan masyarakat.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program dana Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS dilaksanakan pada tahun 2005 untuk mendukung program pendidikan pemerintah wajib belajar 9 tahun. Dana BOS dialokasikan dalam APBN untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dasar yang lebih bermutu. Dana BOS dialokasikan untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB serta digunakan untuk:

- a. Biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar, dan
- b. Mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dana BOS merupakan pelengkap dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan dan bukan merupakan pengganti BOS Daerah (BOSDA). Kebutuhan alokasi dana BOS diusulkan oleh Kemendikbud untuk kemudian disalurkan dari rekening kas Negara ke rekening kas umum daerah provinsi untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah.

Belanja Daerah

Belanja daerah (Elizar Sinambela & Eka Nurmala Sari, 2018) adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 32/2004). Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan program kerja seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga (Sujono, 2019).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas (Ghozali, 2016) bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat dari suatu peristiwa/fenomena dan berusaha untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Belanja daerah sebagai variabel intervening. Penelitian dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2011-2014. Penelitian dilakukan sejak bulan September 2015 s.d Juni 2016. (Juliandi & Irfan, M.S., 2016) Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi harus sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian serta didefinisikan secara tegas (batasannya/kriterianya). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2011-2014 yang berjumlah 33 kabupaten/kota. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode Sampling. Data yang digunakan peneliti adalah data sekunder, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Utara, Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Laporan Dana Bos tahun 2011-2014 dan data IPM pada seluruh kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian. Sumber data tersebut diperoleh dari Biro Pusat Statistik Sumatera Utara (sumut.bps.go.id), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (djpk.kemenkeu.go.id) dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Data penelitian disajikan dalam *time series* (antar waktu) dan *cross section* (antar daerah kabupaten/kota). Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis jalur (*path analysis*). Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dan simultan. Data yang diperoleh berupa data sekunder

akan diolah dengan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Sedangkan untuk menguji pengujian variabel intervening digunakan metode analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (*model casual*) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengujian Hipotesis Pertama

Uji Koefisien Determinasi (R^2) Struktur 1

Tabel 2 Koefisien Determinasi untuk persamaan struktur I

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.765 ^a	.585	.575	0.429948

a. Predictors: (Constant), BKP, PAD, Dana Perimbangan

b. Dependent variable: Belanja Daerah

Berdasarkan tabel 2 nilai koefisien determinasi R^2 untuk persamaan struktur I sebesar *adjusted R*² = 0,575 yang berarti variabel dependen pada penelitian mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 57,5%. Kesimpulannya 57,5% perubahan yang terjadi pada Belanja daerah mampu dijelaskan oleh variabel Dana perimbangan (X_1), Pendapatan asli daerah (X_2) dan Bantuan keuangan provinsi (X_3) sedangkan sisanya 42,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji Statistik F Struktur 1

Tabel 3. Uji Statistik F Struktur 1
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	33.287	3	11.096	60.024	.000 ^a
	Residual	23.661	128	.185		
	Total	56.949	131			

a. Predictors: (Constant), BKP, PAD, Dana Perimbangan

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : hasil penelitian, 2016

Berdasarkan tabel 3, untuk persamaan substruktur pertama diperoleh nilai F hitung = 60,024 > F tabel = 2,68 artinya berpengaruh dan diketahui bahwa nilai probabilitas (*Sig*) 0,000 lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi yaitu 0,05 artinya signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana perimbangan (X_1), Pendapatan asli daerah (X_2) dan Bantuan keuangan provinsi (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja daerah (Y_2) pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$.

Uji Statistik t Struktur 1

Tabel 4. Uji Statistik t Struktur 1
Coefficients^a

Model	Beta	T	Sig.
-------	------	---	------

l(Constant)		7.612	.000
Dana	.110	1.787	.076
Perimbangan			
PAD	.716	11.684	.000
BKP	.127	2.185	.031

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4, pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen sebagai berikut :

a. Variabel Dana perimbangan (X_1) terhadap Belanja daerah

Variabel Dana perimbangan (X_1) diketahui memiliki koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,125. Hal ini berarti variabel Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja daerah. Variabel Dana perimbangan memiliki nilai signifikansi = $0,076 > \alpha = 0,05$ yang artinya tidak signifikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial variabel Dana perimbangan (X_1) berpengaruh positif terhadap Belanja daerah (Y_2) namun tidak signifikan.

b. Variabel Pendapatan asli daerah (X_2) terhadap Belanja daerah

Variabel pendapatan asli daerah (X_2) diketahui memiliki koefisien regresi bernilai positif yaitu 2,3. Hal ini berarti variabel dana Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap Belanja daerah. Variabel Pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikansi = $0,000 < \alpha = 0,05$ yang artinya signifikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial variabel Pendapatan asli daerah (X_2) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja daerah (Y_2).

c. Variabel Bantuan keuangan provinsi (X_3) terhadap Belanja daerah

Variabel bantuan keuangan provinsi (X_3) diketahui memiliki koefisien regresi bernilai positif yaitu 2,042. Hal ini berarti variabel Bantuan keuangan provinsi berpengaruh terhadap Belanja daerah. Variabel Bantuan keuangan provinsi memiliki nilai signifikansi = $0,031 < \alpha = 0,05$ yang artinya signifikan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah secara parsial variabel Bantuan keuangan provinsi (X_3) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja daerah (Y_2).

Pengujian Hipotesis Kedua

Uji Koefisien Determinasi (R^2) Struktur 2

Tabel 5. Koefisien Determinasi (R^2) Struktur 2

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.534 ^a	.285	.256

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, BKP, Dana Perimbangan, PAD, Dana BOS

b. Dependent Variable: IPM

Berdasarkan Tabel 5 di atas diketahui nilai R sebesar 0,534 hal ini menunjukkan bahwa peran, etika, kompetensi, dan kepatuhan pelaksanaan tindak lanjut sebagai variabel independen memiliki hubungan yang kuat sebesar 28,5% dengan pencegahan fraud sebagai variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,285 artinya 28,5% variabel peran, etika, kompetensi, dan kepatuhan pelaksanaan tindak lanjut serta sisanya sebesar 71,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model ini.

Uji Statistik F Struktur 2

Tabel 6. Uji Statistik F Struktur 2

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.093	5	.019	10.036	.000 ^a
Residual	.233	126	.002		
Total	.325	131			

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, BKP, Dana Perimbangan, PAD, Dana BOS

b. Dependent Variable: IPM

Sumber : hasil penelitian, 2016

Berdasarkan tabel 6. untuk persamaan substruktur kedua diperoleh nilai F hitung = 10,036 > F tabel = 2,29 artinya berpengaruh dan diketahui bahwa nilai probabilitas (*Sig*) 0,000 lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi yaitu 0,05 artinya signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana perimbangan (X_1), Pendapatan asli daerah (X_2), Bantuan keuangan provinsi (X_3), Dana BOS (X_4) dan Belanja daerah (Y_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM (Y_1) pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Berdasarkan tabel 5.. diketahui hasil uji F test diperoleh angka 41,301 pada tingkat signifikansi 0,000. Karena F sig lebih kecil dari α (0,05) serta nilai F hitung lebih besar dari pada F tabel (2,47), maka dapat disimpulkan bahwa peran, etika, kompetensi, dan kepatuhan pelaksanaan tindak lanjut secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud.

Uji Statistik t Struktur 2

Tabel 7. Uji Statistik t Struktur 2

Model	Standardized Coefficients		T	Sig.
	Beta			
1 (Constant)			84.148	.000
Dana Perimbangan	.028		.328	.744
PAD	.350		2.418	.017
BKP	.152		1.936	.050
Dana BOS	-.159		-.999	.320
Belanja Daerah	.329		2.582	.011

a. Dependent Variable: IPM

Sumber : hasil penelitian, 2016

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7, pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen sebagai berikut :

a. Variabel Dana perimbangan (X_1) terhadap IPM

Variabel Dana perimbangan (X_1) memiliki koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,028 dan nilai signifikansi = 0,744 > $\alpha = 0,05$ yang artinya tidak signifikan. Hal ini berarti secara parsial variabel Dana perimbangan (X_1) berpengaruh namun tidak signifikan terhadap IPM (Y_2).

b. Variabel Pendapatan asli daerah (X_2) terhadap IPM

Variabel Pendapatan asli daerah (X_2) memiliki koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,350 dan nilai signifikansi = 0,017 > $\alpha = 0,05$ yang artinya signifikan. Hal ini berarti secara parsial variabel pendapatan asli daerah (X_2) berpengaruh positif signifikan terhadap IPM (Y_1).

c. Variabel Bantuan keuangan provinsi (X_3) terhadap IPM

Variabel Bantuan keuangan provinsi (X_3) memiliki koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,185 dan nilai signifikansi = 0,050 = α = 0,05 yang artinya signifikan. Hal ini berarti secara parsial variabel Bantuan keuangan provinsi (X_3) berpengaruh signifikan terhadap IPM (Y_1).

d. Variabel Dana BOS (X_4) terhadap IPM

Variabel Dana BOS (X_4) memiliki koefisien regresi bernilai negatif yaitu -0,201 dan nilai signifikansi = 0,320 > α = 0,05 yang artinya tidak signifikan. Hal ini berarti secara parsial variabel Dana BOS (X_4) berpengaruh namun tidak signifikan terhadap IPM (Y_1).

e. Variabel Belanja Daerah (Y_2) terhadap IPM

Variabel Belanja daerah (Y_2) memiliki koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,025 dan nilai signifikansi = 0,011 < α = 0,05 yang artinya signifikan. Hal ini berarti secara parsial variabel Belanja daerah (Y_2) berpengaruh positif signifikan terhadap IPM (Y_1).

Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengaruh Dana perimbangan, PAD dan Bantuan keuangan provinsi terhadap IPM melalui Belanja daerah

Berdasarkan nilai koefisien yang didapat dari hasil pengujian didapat hasil bahwa pada dana perimbangan nilai koefisien jalur langsung lebih kecil dari jalur tidak langsung ($0,028 < 0,036$) yang berarti Belanja daerah merupakan variabel intervening diantara Dana perimbangan terhadap IPM. Sedangkan nilai koefisien jalur langsung dari Pendapatan asli daerah lebih besar dari jalur tidak langsung ($0,350 > 0,236$) yang berarti belanja daerah bukan variabel intervening diantara PAD terhadap IPM (Maki et al., 2017). Demikian juga nilai koefisien jalur langsung dari Bantuan keuangan provinsi lebih besar dari jalur tidak langsung ($0,52 > 0,042$) yang artinya Belanja daerah juga bukan variabel intervening diantara bantuan keuangan provinsi terhadap IPM. Melihat data diatas maka Belanja daerah merupakan variabel intervening bagi Dana perimbangan terhadap IPM, namun Belanja daerah bukan variabel intervening bagi Pendapatan asli daerah dan Bantuan keuangan provinsi terhadap IPM. Menurut (Sugiyono, 2012) pengertian variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Dapat diartikan pada penelitian ini bahwa Belanja daerah merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara Dana perimbangan terhadap IPM.

KESIMPULAN

Dari analisa data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan: Dana perimbangan, Pendapatan asli daerah dan Bantuan keuangan provinsi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini sesuai dengan hipotesis dari peneliti bahwa secara simultan ketiga variabel diatas berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Secara parsial Dana perimbangan bernilai positif dan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Belanja daerah yang berarti apabila terjadi peningkatan pada Dana perimbangan akan meningkatkan Belanja daerah walau tidak signifikan. Pendapatan asli daerah dan Bantuan keuangan provinsi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja daerah yang berarti apabila terjadi peningkatan pada Pendapatan asli daerah dan Bantuan keuangan provinsi akan meningkatkan Belanja daerah secara signifikan. Hal diatas sesuai dengan hipotesis dari peneliti kecuali untuk Dana perimbangan. Dana perimbangan, Pendapatan asli daerah, Bantuan keuangan provinsi, Dana BOS dan Belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang dibuat oleh peneliti bahwa

secara simultan Dana perimbangan, Pendapatan asli daerah, Bantuan keuangan provinsi, Dana BOS dan Belanja daerah terhadap IPM. Secara parsial Dana perimbangan bernilai positif dan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap IPM yang berarti kenaikan Dana perimbangan akan menaikkan nilai IPM walau tidak signifikan. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis peneliti. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Bantuan keuangan provinsi dan Belanja daerah bernilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini berarti peningkatan PAD dan Bantuan keuangan provinsi akan meningkatkan IPM secara signifikan. Ini sesuai dengan hipotesis peneliti. Dana BOS bernilai negatif yang berarti kenaikan Dana BOS tidak menaikkan nilai IPM.. Dana BOS pada penelitian ini selama tahun 2011-2014 memiliki berpengaruh yang tidak signifikan terhadap IPM. Dapat diartikan bahwa penyaluran Dana BOS masih belum seperti yang diharapkan yaitu untuk meningkatkan indeks pendidikan yang merupakan salah satu indeks dari IPM. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis peneliti. Berdasarkan nilai koefisien yang didapat dari hasil pengujian didapat hasil bahwa pada Dana perimbangan nilai koefisien jalur langsung lebih kecil dari jalur tidak langsung ($0,028 < 0,036$) yang berarti Belanja daerah merupakan variabel intervening diantara Dana perimbangan terhadap IPM. Sedangkan nilai koefisien jalur langsung dari PAD lebih besar dari jalur tidak langsung ($0,350 > 0,236$) yang berarti Belanja daerah bukan variabel intervening diantara PAD terhadap IPM. Demikian juga nilai koefisien jalur langsung dari Bantuan keuangan provinsi lebih besar dari jalur tidak langsung ($0,52 > 0,042$) yang artinya Belanja daerah juga bukan variabel intervening diantara Bantuan keuangan provinsi terhadap IPM. Berdasarkan hal di atas maka yang dapat diterima dari hipotesis peneliti hanya Dana perimbangan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja daerah sedangkan hipotesis tentang Pendapatan asli daerah dan Bantuan keuangan provinsi berpengaruh terhadap IPM melalui Belanja daerah tidak dapat diterima.

REFERENSI

- Budiriyanto, E. (2011). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Formulasi DAU. Ditjen Perimbangan Keuangan*.
- Elizar Sinambela, F. S., & Eka Nurmala Sari. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 1–9.
- ferdian, yuriko. (2013). pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 1–30.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayahwati, N. (2011). Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Tesis. Program Magister Fakultas Ekonomi Universitas Jember. *Tesis. Program Magister Fakultas Ekonomi Universitas Jember*.
- Horota, Parson., Riani, I.A.P., dan Marbun, R. . (n.d.). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi daerah Di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Keuda*, 2(1).
- Juliandi, A., & Irfan, M.S., S. . (2016). *Mengolah Data Penelitian Bisnis Dengan SPSS* (Cetakan Pe). Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- kolinug, ferly Christian, kumenaung, Anderson Guntur, rotinsulu, debby C. (2015). analisis pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja pemerintah daerah kota manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 17(2), 1–20.

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis

Vol 22 No 2 Tahun 2022 , hal 189-198

ISSN 1693-7597 (Print), 2623-2650 (online)

Available online: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan>

- Maki, V. A. A., Massie, J. D. ., & Soepeno, D. (2017). Pengaruh Store Atmosphere dan Faktor Psikologis Terhadap Keputusan Pembelian Pada Matahari Departemen Store Mega Trade Center Manado. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1381–1391.
- Salindeho, C. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 04(03), 705–716.
- Sugiyono. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Sujono, I. G. (2019). pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di kabupaten dan kota provinsi jawa timur. *Management Accounting*, 1–20.
- Widari, B. E. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 5(10), 1–17.